



PROVINSI SUMATERA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Rimbo Panjang No. 020, Laban, Salido, Painan, Telpn 0756 21080 Fax. 0756 465207/465064
Kode Pos : Painan 25651 E-mail: nakerpessela@hotmail.co.id / trans_pesisirselatan@yahoo.com



Laporan Kinerja (LKj)

2020



PAINAN – 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah dimana Laporan kinerja ini disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan.

Kami mengharapkan adanya informasi-informasi berupa saran masukan, koreksi serta kritikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.

Painan, 8 Februari 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan



SIRDIN MASRUL,SH.M.Si
NIP. 196712121989031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
1.2. Kepegawaian, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	2
1.3. Sarana dan Prasarana Pendukung	9
1.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Tranamigrasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan.....	11
2.1.1 Visi	11
2.1.2 Misi.....	11
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	12
2.2. Indikator Kinerja Utama	13
2.3. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020	17
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019	17
3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai Akhir Periode Renstra	18

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi...	25
5. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	26
B. Realisasi Anggaran	27

BAB IV PENUTUP

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1. Misi, Tujuan dan Sasaran	12
TABEL 2. Indikator Kinerja Utama	14
TABEL 3. Perjanjian Kinerja	15
TABEL 4. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	17
TABEL 5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019	17
TABEL 6. Perbandingan Capaian Kinerja 2020 sampai dengan Akhir Periode Renstra	18
TABEL 7. Realisasi Indikator 1 Sasaran1	19
TABEL 8. Realisasi Sasaran 2	20
TABEL 9. Data Pencari Kerja (AK II Tahun 2020	20
TABEL 10. Data penempatan Tenaga Kerja	21
TABEL 11. Daftar SMK Mempunyai Bursa Kerja Khusus	21
TABEL 12. Pelatihan Institusional Balai latihan Kerja (BLK) Painan	23
TABEL 13. Realisasi Sasaran 3	24
TABEL 14. Realisasi Sasaran 4	25
TABEL 15. Kegiatan Fisik di kawasan Transmigrasi	25
TABEL 16. Analisis anggaran Terhadap Sasaran Strategis Tahun 2020	26
TABEL 17. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2020	27
TABEL 18. Sasaran, Anggaran, Realisasi dan Capaian Keuangan Tahun 2020	28

BAB I

PENDAHULUAN

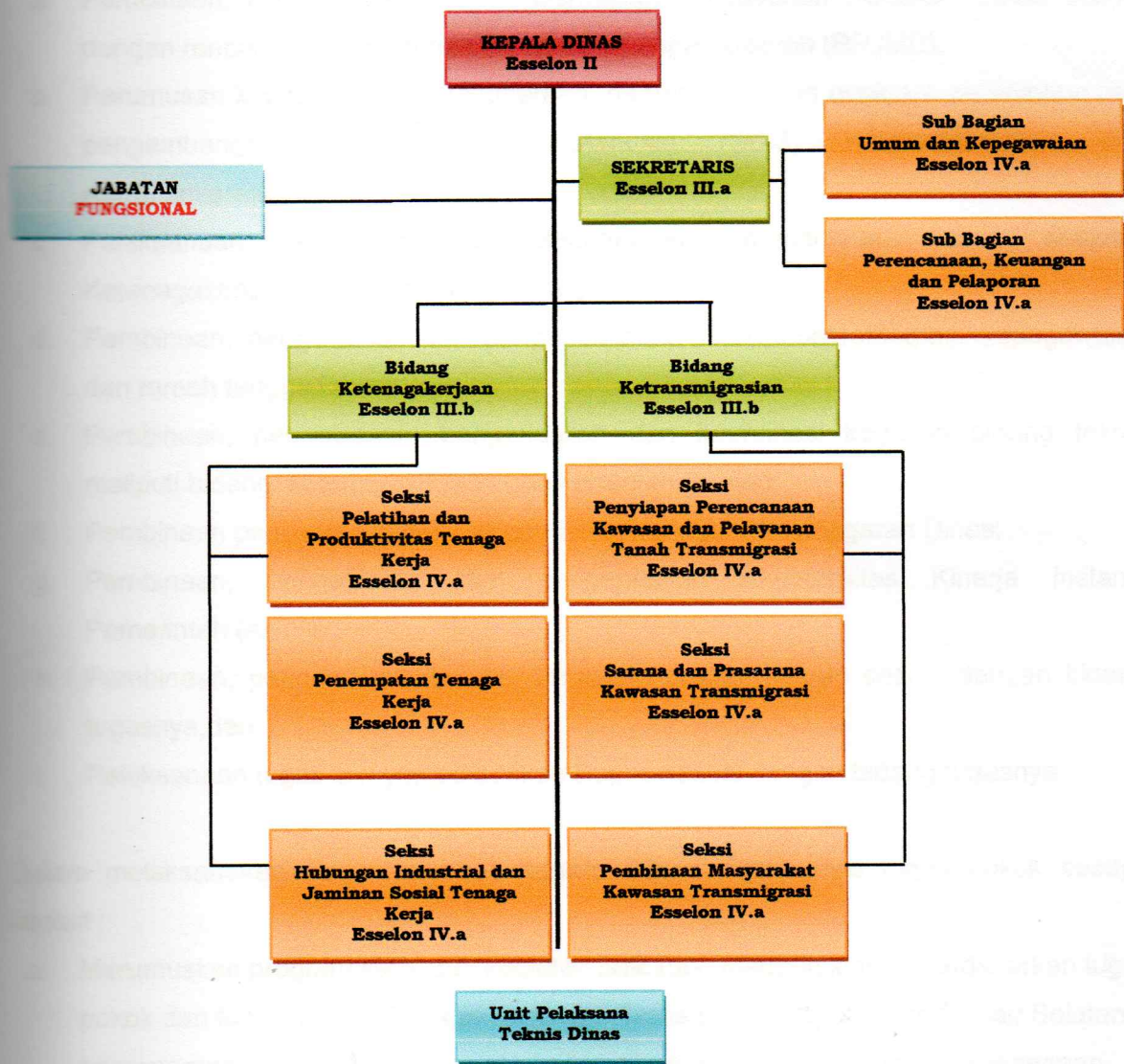
1.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat serta 2 (dua) Bidang yaitu, Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Ketransmigrasian. Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Ketenagakerjaan membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - 3. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- e. Bidang Ketransmigrasian membawahi :
 - 1. Seksi Penyiapan Perencanaan Kawasan dan Pelayanan Tanah Transmigrasi
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
 - 3. Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan**



1.2 Kepegawaian dan Tukopsi Eselon II dan III

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas **Kepala Dinas** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan Renstra Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- c. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya.
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran.
- e. Memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

- f. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas.
- g. Menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
- i. Mengkoordinir dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis lingkup dinas.
- j. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan.
- k. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
- l. Mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya.
- m. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan.
- n. Menghadiri rapat koordinasi dan rapat-rapat lainnya.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Kerja tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan 2 (dua) Bidang. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat terdiri dari Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, sedangkan Bidang terdiri dari Kepala Bidang masing-masing dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi.

1. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- d. Pembinaan dan pelaksanaan Sekretariat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, **Sekretaris** mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas.
- b. Mengkoordinasikan bidang- bidang dilingkup dinas.
- c. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.
- d. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
- e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- f. Memberi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, mengevaluasi, membina, mengawasi serta menilai tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas sekretariat.
- g. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut bidang Sekretariat.
- h. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- i. Membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas.
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan.
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- l. Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga.
- m. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- n. Membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan dinas.
- o. Mengoordinasikan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

2. **Kepala Bidang Ketenagakerjaan** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Ketenagakerjaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, **Bidang Ketenagakerjaan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketenagakerjaan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas Bidang Ketenagakerjaan.
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Ketenagakerjaan.
- d. Menyusun dan mengolah data ketenagakerjaan.
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang ketenagakerjaan.
- f. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan.
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.

- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan.
- i. Memfasilitasi perlindungan tenaga kerja dibidang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- j. Menyiapkan bahan penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan.
- k. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
- l. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
- m. Membagi tugas atau kegiatan, petunjuk, memeriksa, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Ketenagakerjaan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan.
- n. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan melalui Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas bidang.
- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. **Kepala Bidang Ket transmigrasian** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ket transmigrasian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang ket transmigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Penyiapan, Perencanaan Kawasan dan Pelayanan Pertanahan, Penempatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan, Perencanaan Kawasan dan Pelayanan Pertanahan, Penempatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Penyiapan, Perencanaan Kawasan dan Pelayanan Pertanahan, Penempatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyiapan, Perencanaan Kawasan dan Pelayanan Pertanahan, Penempatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penyiapan, Perencanaan Kawasan dan Pelayanan Pertanahan, Penempatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Ketransmigrasian.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, **Bidang Ketransmigrasian** mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan pedoman teknis yang berkaitan dengan ketransmigrasian.
- b. Menyusun rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Ketransmigrasian serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Melaksanakan penyiapan pemukiman dan penempatan calon transmigrasi.
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap sosiasl budaya dan ekonomi masyarakat transmigrasi.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang ketransmigrasian.
- f. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang ketransmigrasian.
- g. Memberikan layanan konsultasi, fasilitas, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyiapan Pemukiman, Seksi Pemempatan dan Seksi Penyiapan Pembinaan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi.
- h. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut upaya penyelesaiannya.
- i. Menanda tangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
- j. Meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan Bidang Ketransmigrasian dengan mempedomani data atau peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar.
- k. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, memeriksa, dan menilai hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Ketransmigrasian.
- l. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan melalui sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas bidang.

- Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana Pendukung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per akhir tahun 2020 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung berjumlah 6 (enam) unit dalam satu lokasi :
 1. Bangunan Kantor 2 (dua) unit.
 2. Workshop 3 (tiga) unit.
 3. Aula pertemuan.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti, mobiler (meja dan kursi), komputer, Printer, Mesin Absen (Pinger), mesin tik, jaringan telepon dan internet, listrik dan air.
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - 2 (dua) unit mobil.
 - 4 (empat) unit motor

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan penambahan angkatan pencari kerja (angkatan kerja 176.530, bekerja 155.894, pengangguran 20.636 dengan persentase 11,69 % dari jumlah penduduk 446.636 jiwa (BPS Kab.Pessel dan Pusdatinaker per Agustus 2015).
- b. Tingkat keterampilan dan kemauan pencari kerja masih sangat rendah dari tuntutan dunia kerja.
- c. Profesionalitas tenaga kerja yang belum terpenuhi.
- d. Kurangnya Sarana dan Prasarana BLK.
- e. Sulitnya mendapatkan areal/lahan yang tidak bermasalah (clear and clean) di Kawasan transmigrasi.
- f. Sulitnya mengembangkan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di kawasan transmigrasi.
- g. Belum lengkapnya utility seperti sistem kelistrikan, telepon, instalasi air dan lain-lain pada kawasan transmigrasi.
- h. Sulitnya memberikan pandangan dan wawasan kepada masyarakat transmigran tentang peluang pengembangan usaha.
- i. Sulitnya melakukan konservasi lahan dan pelestarian sumber daya air di kawasan transmigrasi.
- j. Sulitnya memberikan pengertian dan pemahaman tentang tata cara pengelolaan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PESISIR SELATAN 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera".

2.1.2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur yang terkait dengan sektor.
- c. Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1.
Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Misi	Tujuan	Sasaran
<u>Bidang Tenaga Kerja</u> 1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka dalam Rangka Peningkatan Dalam Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Dan Infrastruktur Sosial Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah	Menurunnya tingkat pengangguran	1 Menurunnya tingkat pengangguran
		2 Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja
		3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans
<u>Bidang Transmigrasi</u> 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Dan Infrastruktur Sosial Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi	1 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Transmigran

22. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.. Keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 4 (empat) indikator yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Sumber Data	KET.
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja disnakertrans	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disnakertrans	-	-	B	BB	A	A	Bidang Sekretariat	-
2. Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase angka pengangguran terbuka	11,69%	5,95%	5,85%	5,70%	5,60%	5,50%	Bidang Tenaga Kerja	-
3. Meningkatkan pemenuhan hak-hak pekerja	Jumlah sengketa hubungan industrial	70%	75%	80%	85%	0	95%	Bidang Tenaga Kerja	Untuk Tahun 2020 Kegiatan untuk mendukung sasaran strategis tidak anggarkan
4. Peningkatan kemandirian masyarakat transmigran	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri	45 %	50 %	55 %	60%	65 %	75%	Bidang Transmigrasi	-

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2020 meliputi 4 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.
Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disnakertrans	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disnakertrans	A
2.	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase angka pengangguran terbuka	5.84%
3.	Meningkatnya pemenuhan hak-hak pekerja	Jumlah sengketa hubungan industrial	0
4.	Peningkatan kemandirian masyarakat transmigran	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri	65%

AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Hasil pengukuran kinerja terhadap 4 program (meliputi 2 program rutin dan 2 program urusan) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 menunjukkan bahwa secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai kinerja yang baik terkait urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Meski demikian masih terdapat indikator yang belum memenuhi target. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten maka penetapan indikator-indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020 diperoleh dari hasil pengumpulan data kinerja yang dilakukan oleh masing-masing bidang, yang meliputi bidang yaitu:

1. Bidang Tenaga Kerja
2. Bidang Transmigrasi

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil.
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil.
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil.
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

1. **Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tabel berikut ini:

Tabel 4.

**Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Indikator kinerja	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
Hasil penilaian akip disnakertrans oleh inspektorat	A	BB	85
Persentase Angka Pengangguran Terbuka	5,84%	5,84%	100
Jumlah Sengketa Hubungan Industrial	0	0	0
Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri	65%	65%	100

2. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019**

Capaian kinerja tahun 2020 dan 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Pesisir selatan masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisai	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans	hasil penilaian akip disnakertrans oleh inspektorat	BB	BB	100	A	BB	85

2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran Terbuka	5,70%	5,68%	99,65	5,84%	5,84%	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial	85%	76,5%	90,00	0	0	0
4	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Transmigran	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri	60%	60%	100	65%	65%	100

1. Perbandingan Capaian Kinerja sampai Akhir Periode Renstra

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam dokumen Renstra Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupten Pesisir Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6.

Perbandingan Capaian Kinerja 2020 sampai dengan Akhir Periode Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2020	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans	hasil penilaian akip disnakertrans oleh inspektorat	A	BB	100
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran Terbuka	5,83%	5,84%	103,28
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial	95 %	0	80,52

4	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Transmigran	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri	75 %	65%	86,66
---	--	--	------	-----	-------

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

Secara umum dapat dijelaskan dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menunjukkan hasil realisasi indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Analisis penyebab keberhasilan akan peningkatan/ penurunan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijelaskan sebagai berikut.

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas tenaga kerja dari hasil evaluasi melalui 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja

Tabel 7.
Realisasi Sasaran1

Indikator kinerja	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
Hasil penilaian akip disnakertrans oleh inspektorat	A	BB	85

Berdasarkan analisis terhadap Predikat (nilai) Sakip Tenaga Kerja dan Transmigrasi, realisasi predikat BB dari target A

Faktor pendorong keberhasilan keberhasilan sasaran ini adalah :

- Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
- Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
- Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

Masih adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun masih dalam rentang “sangat berhasil”, yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Upaya perbaikan:

Mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target, indeks kepuasan layanan di 2 (dua) bidang masih dibawah target tingkat capaian dan dilakukan evaluasi berdasarkan nilai atau unsur layanan yang belum masuk kategori baik.

2. Menurunnya Tingkat Pengangguran

Tabel 8.

Realisasi Sasaran 2

Indikator kinerja	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Angka Pengangguran Terbuka	5,84%	5,84%	100

Untuk tahun 2020 capaian kinerja pada sasaran 1 indikator Persentase angka pengangguran terbuka. Melalui program peningkatan kesempatan kerja, dengan kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga.

Tabel 9.

Data Pencari Kerja (AK I) Tahun 2020

No.	Bulan	KELOMPOK UMUR												
		15 - 19		20 - 29		33 - 44		45 - 54		55+				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Januari	31	21	15	12	15	10	0	1	0	0	61	44	105
2.	Februari	18	10	23	26	13	22	0	0	0	0	54	58	112
3.	Maret	13	13	11	12	2	1	0	0	0	0	26	26	52
4.	April	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
5.	Mei	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
6.	Juni	44	59	15	14	0	0	0	0	0	0	59	73	132
7.	Juli	278	354	27	75	2	33	0	0	0	0	305	462	767
8.	Agustus	73	111	21	32	5	2	0	0	0	0	99	145	244
9.	September	70	57	31	12	5	7	0	0	0	0	106	76	182
10.	Oktober	7	11	20	34	4	5	0	0	0	0	31	50	81
11.	November	9	11	33	52	5	13	0	0	0	0	47	76	123
12.	Desember	17	20	16	5	2	2	0	0	0	0	35	27	62
														1867

Tabel 10.**Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Tahun	Dalam Negeri			Luar Negeri			Total
		L	P	Jml	L	P	Jml	
1	2015	153	97	250	84	23	107	357
2	2016	122	158	280	113	19	132	412
3	2017	190	160	350	121	27	148	498
4	2018	1.842	1.978	3.820	151	114	265	4.085
5	2019	1.032	1.247	2.280	118	168	286	2.566
6	2020	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2015 jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri 250 orang dan jumlah penempatan diluar negeri 107 orang total penempatan tenaga kerja pada tahun 2015 sebanyak 357 orang. Tahun 2016 jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri 280 orang dan jumlah penempatan luar negeri 132 orang total penempatan tenaga kerja pada tahun 2016 sebanyak 412 orang. Tahun 2017 jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri 350 orang dan jumlah penempatan luar negeri 148 orang total penempatan tenaga kerja pada tahun 2017 sebanyak 498 orang. Tahun 2018 jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri 3.820 orang dan jumlah penempatan luar negeri 265 orang total penempatan tenaga kerja pada tahun 2018 sebanyak 4.085 orang. Tahun 2019 jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri 2.280 orang dan jumlah penempatan luar negeri 286 orang total penempatan tenaga kerja pada tahun 2019 sebanyak 2.566 orang. Untuk tahun 2020 penempatan tenaga tidak dilaksanakan karena adanya pandemic covid-19.

Tabel 11.

Daftar SMK Mempunyai Bursa Kerja Khusus (BKK)
Di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama SMK	Kompetensi
1	SMKN 1 PAINAN	Bisnis Daring dan Pemasaran
		Akomodasi Perhotelan
		Akomodasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Teknik computer dan Jaringan
		Perhotelan
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
		Jasa Boga
2	SMKN 2 Painan	Teknik Audio
		Teknik Kendaraan Ringan
3	SMKN 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN	Teknik Kendaraan Sepeda Motor
		Teknik Kendaraan Ringan otomotif

		Teknik Audio video
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Rekayasa Perangkat Lunak
4	SMKN 1 RANAH PESISIR	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Multimedia
		Bisnis Kontruksi dan Properti
		Tata Busana
		Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevision
		Tata Boga
		Tata Busana
		Teknik Konstruksi Batu dan beton
		Perbankan dan Keuangan Mikro
5	SMKN 1 PANCUNG SOAL	Teknik Kendaraan Ringan
		Teknik instalasi Tenaga Listrik
		Pemasaran
		Administrasi Perkantoran
		Akuntansi
6	SMKN 1 SUTERA	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
		Teknik Audio Vidio
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
		Teknik Kendaraan Ringan
7	SMKN 1 LINGGO SARI BEGANTI	Teknik Kendaraan Ringan
		Teknik Sepeda Motor
		Teknik Gambar Bangunan
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		Teknik Komputer dan jaringan
		Teknik Kendaraan Ringan Otomoif
		Teknik Audio Video
8	SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		Teknik Sepeda Motor
		Bisnis Kontruksi dan Properti
		Teknik Gambar Bangunan
		Teknik Audio Video
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
9	SMKS E ADI KARYA LINGGOSARI BEGANTI	Bisnis Daring dan Pemasaran
		Akomodasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
		Teknik computer dan Jaringan
		Multimedia
		Pemasaran
10	SMKS MAKMUR LENGAYANG	Akuntansi
11	SMKS AL ANHAR BAYANG	Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
12	SMKS TEKNOLOGI LENGAYANG	Teknik Sepeda Motor
		Teknik instalasi Tenaga Listrik
		Teknik Otomotif Kendaraan Ringan

13	SMKS PGRI PAINAN	Akuntansi
14	SMKS PLUS BUDI DARMA LUMPO	Akuntansi
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Teknik Otomotif Sepeda Motor
15	SMKS ADO KARYA RANAH PESISIR	Teknik gambar bangunan
		Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		Rekayasa Pengakut lunak
		Teknik Instalasi tenaga listrik
		Teknik Audio Video
		Akuntansi
16	SMKS MADRASAH ARABIYAH AYANG	Teknik Sepeda Motor

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan keahlian, keterampilan dan produktifitas kerja bagi sumber daya manusia agar mampu mengolah potensi sumber daya yang dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri atau berwirausaha dilaksanakan secara instutisional di Balai Latihan Kerja (BLK)

Tabel 12.

Pelatihan Institusional Balai Latihan Kerja (BLK) Panian

No	Jurusan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan
1	Menjahit	16 orang
2	Cabinet Making	16 orang
3	Kelistrikan	16 orang
4	Processing	16 orang
5	Otomotif Kendaraan Ringan	16 orang
6	Pengelasan	16 orang
Jumlah		96 orang

Eksistensi BLK pada saat ini cukup penting mengingat ini tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan lapangan kerja yang terbatas, maka dengan adanya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan ini selain itu diharapkan juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang berguna bagi pencari kerja.

Kebutuhan yang begitu besar pelatihan tenaga kerja mendorong SKPD untuk semaksimal mungkin mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Pelatihan untuk tenaga kerja dilaksanakan guna menyiapkan tenaga kerja terlatih bagi pencari kerja agar memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Kebutuhan yang begitu besar bagi tenaga kerja terlatih mendorong SKPD untuk semaksimal mungkin mensssgusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Dalam hal ini Pemerintah Daerah juga mendukung program dengan mengalokasikan anggaran. Untuk pelatihan berbasis masyarakat diutamakan bagi kelompok keluarga miskin, penganggur, diajukan oleh pemerintah desa setempat, pendidikan minimal, sedangkan pelatihan berbasis kompetensi diutamakan bagi yang telah mempunyai keterampilan khusus dan tinggal memoles serta meningkatkan keterampilan supaya bisa bersaing didunia kerja.

3. Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja

Tabel 13.
Realisasi Sasaran 3

Indikator kinerja	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian%
Jumlah Sengketa Hubungan Industrial	0%	0%	0

Pada sasaran meningkatnya pemenuhan hak-hak pekerja dengan indicator jumlah sengketa hubungan industrial untuk Tahun 2020 kegiatan untuk mendukung sasaran tersebut tidak dianggarkan.

4. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Transmigran

Tabel 14.
Realisasi Sasaran 4

Indikator kinerja	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian%
Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri	65%	65%	100

Pencapaian indikator kinerja Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri target 65% dengan realisasi 65% sehingga Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri masuk kriteria sangat berhasil. Pembangunan dikawasan transmigrasi mempunyai visi yang intinya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dikawasan yang masih tertinggal (terisolir) serta dapat meningkatkan kesejahteraan transmigran yang tinggal didaerah tersebut .

Pembangunan kawasan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Percepatan pembangunan dikawasan transmigrasi merupakan kebutuhan dan tuntutan untuk, meningkatkan kesejahteraan para masyarakat transmigran dan masyarakat sekitar.

Jumlah pembangunan dikawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis diatas. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari berbagai dukungan indikator kinerja yang lain. Adapun capaian jumlah pembangunan dan pertumbuhan kawasan transmigrasi pada tahun 2020 tahun berikut:

Tabel 15.
Kegiatan Fisik di kawasan Transmigrasi 2020

No	Jenis Paket	Jumlah	Ket
1	Peningkatan jalan talang binjai - perbatasan SP8 muko-muko	2 Paket	APBN

Pencapaian indikator jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri sebanyak 1 (satu) paket dan sudah di realisasikan 100%. Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk,

memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Keputusan untuk bertransmigrasi pada prinsip diambil atas kemauan sendiri dan keyakinan akan hidup lebih baik di daerah transmigrasi. Keberhasilan transmigran yang disebabkan oleh akal daya dan kewiraswastaan yang memungkinkan mereka untuk melihat dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan guna memperbaiki hidup.

Faktor-faktor yang mempengaruhi transmigran adalah lembaga ekonomi yang di dampingi, kemudahan akses IT di kawasan transmigrasi, bantuan yang disalurkan di lembaga ekonomi dan lembaga ekonomi yang mendapatkan pinjaman dari perbankan. Berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial transmigran ditandai oleh meningkatnya kemandirian lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi dengan melaksanakan kegiatan pembinaan usaha transmigrasi akan meningkatnya pendapatan/ penghasilan sehingga mempermudah akses bagi masyarakat transmigrasi untuk terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan.

5. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Rencana pembiayaan dalam pencapaian 3 (tiga) indikator sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator sasaran Tahun 2020 sebesar Rp 3.985.819.210,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.912.415.685,- (98,16 %).

- a. Alokasi Anggaran per Sasaran
 Penggunaan anggaran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai pelaksanaan kegiatan dan program.

Tabel 16.
Analisis Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	% Serapan Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakertrans	Hasil penilaian akip disnakertrans oleh inspektorat	485.104.960,-	473.953.335,-	97,70

Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran Terbuka	48.855.500,-	48.829.500,-	99,95
Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial	0	0	0
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Transmigran	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri	3.451.858.750,-	3.389.632.850,-	98,20
Jumlah		6.271.347.600,-	5.259.815.644,-	83,87

b. Perbandingan pencapaian dan anggaran

Pencapaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut:

Tabel 17.
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DISNAKERTRANS	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DISNAKERTRANS	A	100%	100%	485.104.960	473.953.335	97,70
2	MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN	PERSENTASE ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA	5,84%	5,84%	100%	48.855.500	48.829.500	99,95
3	MENINGKATNYA PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA	JUMLAH SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	0,00
4	PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN	PERSENTASE LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT YANG MANDIRI	65%	65%	100%	3.451.858.750	3.389.632.850	98,20
Jumlah						3.985.819.210	3.912.415.685	98,16

B. Realisasi Anggaran

1. Sasaran, Anggaran, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Tabel 18.

**Sasaran, Anggaran, Realisasi, dan Capaian Keuangan
Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	7	8	9	10
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DISNAKERTRANS	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DISNAKERTRANS	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	411.739.360	405.323.685	98,44
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000	31.645.485	87,90
			Penyediaan jasa administrasi Keuangan	182.788.400	182.788.400	100,00
			Penyediaan jasa kebersihan	109.731.600	107.728.400	98,17
			Penyediaan alat tulis kantor	12.893.100	12.883.200	99,92
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.057.940	11.029.100	99,74
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.358.000	4.357.000	99,98
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000	4.500.000	100,00
			Penyediaan makanan dan minuman	8.250.000	8.250.000	100,00
			Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	5.730.000	5.725.000	99,91
			Rapat-rapat dan koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	27.000.000	27.000.000	100,00
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	9.430.320	9.417.100	99,86
			Prog. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	73.365.600	68.629.650	93,54
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	16.663.600	16.659.000	99,97
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/nonresional	56.702.000	51.970.650	91,66
2	MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN	PERSENTASE ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA	peningkatan kesempatan kerja	48.855.500	48.829.500	99,95
			Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.	48.855.500	48.829.500	99,95
3	MENINGKATNYA PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA	JUMLAH SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan	-	-	0,00
			Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan	-	-	0,00
4	PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN	PERSENTASE LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT YANG MANDIRI	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	3.451.858.750	3.389.632.850	98,20
			Fasilitas dan Dukun Pengembangan Kawasan Transmigrasi	128.266.750	127.626.750	99,50
			Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan/ jembatan dikawasan transmigrasi (DAK fisik afimasi	3.323.592.000	3.262.006.100	98,15
Jumlah				3.985.819.210	3.912.415.685	98,16

Dari tabel diatas dapat dilihat anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebesar Rp.3.985.812.210,- terealisasi sebesar Rp.3.912.415.685,- atau 98,16 %. artinya dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 1,84 % atau secara absolut sebesar Rp 73.403.525,-

Adanya sisa anggaran sebesar Rp 73.403.525,- mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis yang ditetapkan, seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebesar Rp. 3.985.812.210,- terealisasi sebesar Rp. 3.912.415.685,- atau 98,16 %. artinya dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang menunjang pencapaian 3(tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 1,84 % atau secara absolut sebesar Rp73.403.525,-

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Perangkat regulasi Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan daerah belum lengkap. Dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka ada perubahan konten dan nomenklatur/nama dokumen perencanaan daerah, namun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri belum menyesuaikan. Hal ini sangat berpengaruh pada proses pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, karena terjadi inkonsistensi.
- b. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, maka ada perubahan kerangka waktu perencanaan di level Desa yang tidak hirarkhi dengan perencanaan di level Kecamatan dan Kabupaten karena Musrenbang Desa dilakukan setelah dokumen RKPD ditetapkan;

Upaya yang telah dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut yaitu:

1. Menyiapkan instrumen checklist pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan regulasi terkini, sambil menunggu perubahan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.
2. Draft materi usulan Musrenbang Desa, terutama yang diusulkan dibiayai APBD Kabupaten harus sudah terlebih dahulu di sampaikan ke Kecamatan untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan, agar waktunya selaras dengan perencanaan daerah.